

BAB III

SIKAP AMERIKA SERIKAT DALAM *PARIS AGREEMENT* PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP TAHUN 2017

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dan konsepsi diri dari Presiden Donald Trump itu sendiri termasuk asal partai Donald Trump serta pengaruh platform asal partai atau partai berkuasa (Partai Republik) terhadap perilaku dan pola kebijakan Presiden Donald Trump.

Sikap AS dalam isu perubahan iklim dan *Paris Agreement* pada masa pemerintahan Barack Obama menunjukkan dukungan yang kuat terhadap isu perubahan iklim, diikuti dengan langkah-langkah konkret, pencapaian paling besarnya adalah dengan diratifikasinya *Paris Agreement* pada tahun 2016. Pada masa kampanye pemilihan Presiden AS yang ke-45 dengan Donald Trump sebagai kandidat dari Partai Republik dan Hillary Clinton sebagai kandidat dari Partai Demokrat, perpolitikan AS semakin terpolarisasi dengan semakin jelasnya keberpihakan dan kesenjangan yang tinggi antara konservatif dan liberal dalam merespon berbagai isu, utamanya isu perubahan iklim. Sikap skeptis Trump beserta pendukung kalangan Republik telah ditunjukkan sejak awal dengan janjinya menarik AS dari *Paris Agreement* apabila ia terpilih menjadi presiden diikuti oleh langkah eksplisit saat ia mengumumkan bahwa ia menarik AS keluar dari Paris Agreement pada 1 Juni 2017.

Keputusan Trump tersebut didorong oleh dukungan politik yang kuat. Untuk memahami perilaku Donald Trump dalam isu perubahan iklim, dapat diamati dari perilaku para pendahulunya asal Partai Republik yang diketahui sejalan dan sesuai dengan ortodoksi platform yang diusung oleh Partai Republik.

Pada tahun 1997 di bawah kepemimpinan Bill Clinton, AS membuat terobosan baru dengan menandatangani *Kyoto Protocol 1997* sebagai langkah awal sekaligus keseriusan AS untuk terlibat dalam aksi iklim global melalui reduksi gas

rumah kaca melalui agenda-agenda UNFCCC. Meskipun, kesepakatan tersebut akhirnya sama sekali di gagalkan pada masa pemerintahan George W Bush. Kemudian, kebijakan dan aksi iklim AS mulai menguat di masa pemerintahan Obama dengan terobosan baru lainnya dalam menunjukkan dukungan AS dalam agenda iklim global, yakni meratifikasi *Paris Agreement 2015* sebagai agenda iklim lanjutan dari berakhirnya Protokol Kyoto. Langkah tersebut disambut baik oleh negara-negara lain di dunia mengingat selain karena AS dibutuhkan sebagai sumber keuangan dan teknologi tinggi, AS juga merupakan negara kedua penghasil gas emisi karbon terbesar setelah China. Persentase yang signifikan membuat dunia internasional mengharapkan AS untuk berkomitmen dan konsisten dalam Paris Agreement 2015 yang diratifikasi oleh AS di bawah kepemimpinan Obama pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS menarik dari *Paris Agreement* yang baru diratifikasi AS tahun 2016 dengan menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut merugikan bagi AS dan melemahkan industry-industri AS, namun justru mengangkat dan memberikan keuntungan bagi negara-negara lain, misalnya China dan India sebagai negara-negara penghasil karbon terbesar di dunia. Hal tersebut tentu saja memicu berbagai macam respon domestik maupun dunia internasional. Sikap skeptismenya terhadap isu perubahan iklim sudah ia tunjukkan sejak masa kampanye pemilihan presiden. Pandangan tersebut didukung dengan sikap dan respon Trump terhadap kebijakan-kebijakan Obama yang berkenaan dengan lingkungan dan iklim di mana sejak ia terpilih menjadi presiden AS ke-45, Trump segera membuat perintah eksekutif untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan lingkungan dan iklim Obama yang tidak sesuai dengan ortodoksi konservatif berdasarkan platform Republik.

3.1. Konsepsi Peran

3.1.1. Latar Belakang Presiden Donald Trump

Donald Trump dibesarkan sebagai Presbyterian dan ia mengidentifikasi sebagai Protestan garis utama. Ia adalah anak keempat dari lima bersaudara dari Frederick C. dan Mary Anne MacLeod Trump. Frederick merupakan seorang pengusaha *real estate*. Fred meninggal pada tahun 1999, dan Mary meninggal pada tahun berikutnya. Donald Trump tumbuh sebagai anak yang aktif dan inisiatif. Pada usia 13 tahun, ia dikirim ke Akademi Militer New York dan lulus pada tahun 1964 dengan catatan akademis dan kepemimpinan yang baik. Ia melanjutkan pendidikannya dalam bidang studi ekonomi ke Fordham University selama dua tahun yang juga dilakukannya sambil bekerja membantu bisnis ayahnya ketika libur musim panas, kemudian ia dipindahkan ke Wharton School of Finance di University of Pennsylvania dan lulus pada tahun 1968.⁴³

Donald Trump telah menikah sebanyak tiga kali. Istri pertamanya bernama Ivana Zelnickova Winklmayr, seorang model *fashion* New York yang menjadi pengganti Tim Ski Olimpiade Ceko tahun 1972. Keduanya menikah pada tahun 1977 dan memiliki 5 orang anak, kemudian bercerai pada tahun 1992. Pada tahun 1993, ia menikahi Marla Maples, seorang aktris dan memiliki seorang putri bernama Tiffany Trump (lahir pada tahun 1993). Ia juga bercerai dengan Maples pada tahun 1999. Kemudian pada Januari 2005, Trump menikah lagi dengan Melania Knauss, seorang model Sloveni yang lebih muda 23 tahun darinya. Maret 2006, keduanya memiliki anak bernama Barron William Trump. Anak-anaknya, Donald Jr, Eric, dan Ivanka bekerja sebagai wakil presiden eksekutif untuk The Trump Organization dan mengelola bisnis Trump. Suami Ivanka, Jared Kushner adalah seorang penasihat senior Trump.⁴⁴

⁴³ Mark Spratt, "*Donald Trump : Donald Trump's biography : a life worth living*", CreateSpace, New York, 2016

⁴⁴ Loc. cit.

Berawal dari bisnis real estate menengah kebawah yang diwariskan dari orang tuanya, Trump mengembangkan bisnisnya tersebut melalui proyek-proyek property mewah dan terkenal, seperti Grand Hyatt, Trump Tower, Trump Place, Trump International Hotel, Trump World Tower, Hotel, dan Casino mewah di berbagai negara. Tidak hanya itu, Trump melebarkan sayap bisnisnya pada bisnis hiburan besar. Ia memiliki berbagai kontes kecantikan seperti Miss Universe, Miss USA dewasa dan remaja. Karena kesuksesan besarnya sebagai seorang pengusaha besar, ia kemudian memutuskan untuk memulai debutnya di televisi pada tahun 2013 dalam sebuah reality show NBC bernama *The Apprentice*, Mr. Trump, di mana didalam acara tersebut ia membuka peluang pekerjaan untuk diperkerjakan di bawah managementnya.⁴⁵

Selama 14 musim ia menjadi pembawa acara di reality show dan dibayar \$ 213 juta disetiap penayangan. Selain itu, ia juga menulis beberapa buku dan memperluas bisnisnya di sektor fashion dan kebutuhan konsumsi. Diulas dari Forbes, ia diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai \$ 3,7 milyar pada tahun 2016 yang kemudian menurun menjadi \$ 3,1 milyar pada tahun 2017 dikarenakan adanya penurunan nilai *real estate* New York, meskipun Trump menyangkal hal tersebut dan menyebutkan bahwa jumlah bersih kekayaannya tidak mencapai nilai yang disebutkan. Pada saat nilai real estate sedang menurun pada 1990, bisnis Trump pernah diperkirakan juga mengalami deficit yang signifikan hingga akhirnya bisnisnya bangkit kembali pada tahun 1997.⁴⁶

Trump memulai karir politiknya pada tahun 2000 dengan mengikuti nominasi untuk Partai Reformasi namun kemudian mundur. Berikutnya, pada pemilihan umum tahun 2012 ia juga sempat mengemukakan kehendaknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian, pada tahun 201 ia menjadi calon

⁴⁵ Loc. cit

⁴⁶ BBC, "*Donald Trump's Life Story: From Hotel Developer To President*" diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-35318432> pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 9.42

resmi dari Partai Republik dan memenangkan pemilihan umum pada 8 November 2016. Pada 7 Oktober 2016, dua hari sebelum debat presiden dengan Hillary Clinton, Trump terlibat skandal rekaman pembicaraannya di masa lalu yang dirilis *The Washington Pos.* dengan Billy Bush mengenai status selebritasnya yang dapat digunakan untuk mendapat kepuasan seksual dengan sangat mudah.

Setelah permintaan maaf Trump, ia harus menghadapi kenyataan banyaknya penarikan dukungan yang dilakukan oleh seniornya, seperti Ketua DPR AS, Paul Ryan, senator John McCain, Martha Roby, Kelly Ayote, Shelley Moore Capito, Mike Crapo hingga beberapa kritikus Republik. Kemunculan video tersebut kemudian memicu permasalahan lain mengenai banyaknya pengakuan baru dari sejumlah wanita yang mengatakan pernah dilecehkan oleh Trump. Sepanjang masa kepresidenannya tahun 2016, ia menimbulkan kontroversi lain terkait dengan bisnisnya karena ia menolak merilis informasi pajak ketika diaudit oleh *Internal Revenue Service*.⁴⁷

Selama masa kampanye, muncul sebuah laporan intelejen CIA, FBI, dan NSA yang menunjukkan adanya upaya pengarahan dukungan Vladimir Putin terhadap Trump. Kemudian, Trump kembali menerima tuduhan keterlibatannya terhadap upaya peretasan email NDC yang dilakukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mempengaruhi pemilihan AS dengan tujuan mengacaukan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi AS. CIA, FBI, dan NSA mengeluarkan sebuah laporan intelejen AS. Trump sempat mengakui keterlibatan Rusia dalam pemilihan AS, namun kemudian ia menolak tuduhan dalam beberapa kesempatan. Namun, ia tak terlalu menggubris permasalahan ini ketika kebenaran tersebut terbongkar dengan diketahuinya keterlibatan 12 perwira intelejen Rusia atas peretasan NDC dan upaya penjatuhan Clinton, dan 19 orang lainnya yang juga didakwa dengan adanya dugaan *cyber crime*. Setelah masa kampanye yang kontroversial, Trump

⁴⁷ Loc. Cit.

berhasil memenangkan kursi kepresidenan dan melakukan sumpah jabatan sebagai presiden oleh Ketua MA AS, John Roberts. Ia terus menarik perhatian publik bahkan setelah masa kampanye kontroversialnya. Terpilihnya Trump sebagai presiden memicu berbagai demonstrasi mulai dari aktivis atau penggiat lingkungan, pejuang gender perempuan, hingga kalangan selebritis.⁴⁸

Setelah Donald Trump menduduki jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat ia mulai gencar mempromosikan sejumlah perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bahkan menghapuskan beberapa kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan oleh Presiden Barack Obama. Dengan prinsip mengembalikan peran unggul Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang tak terkalahkan, Presiden Donald Trump memberlakukan kebijakan-kebijakan demi terwujudnya kembali Amerika Serikat di atas doktrin "*American First*". Bergabungnya Amerika Serikat dalam Kesepakatan Iklim Paris 2015 dianggap justru bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat di mana Amerika Serikat dapat kehilangan sejumlah besar PDB dan banyak lapangan kerja serta melembahkan berbagai industry besar Amerika Serikat karena membuka peluang atau kesempatan bagi China untuk memungkinkan dapat lebih unggul dari Amerika Serikat.⁴⁹

Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari *Paris Agreement* di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu di mana keputusan tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mencapai tujuan Amerika Serikat yakni mengembalikan kejayaan Amerika Serikat dengan doktrin *American First* yang ditunjukkan secara eksplisit dan disampaikan secara langsung oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 1 Juni 2017. Keputusan tersebut jelas sangat

⁴⁸ Loc. Cit.

⁴⁹ Op. cit.

mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi dalam negeri AS, hubungan Amerika Serikat negara-negara pihak dan actor-aktor eksternal lainnya, serta kondisi iklim global dan keberlangsungan Kesepakatan Iklim Paris itu sendiri. Preferensi pribadi Donald Trump sangat mempengaruhi diambil keputusan tersebut di mana Presiden Donald Trump cenderung pesimistis terhadap hal-hal mengenai pemanasan global dan menganggap bahwa ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam *Paris Agreement* justru akan mematikan daya saing Amerika namun mengangkat negara-negara lainnya dikarenakan ketentuan tanggung jawab yang diberikan kepada negara maju dan negara berkembang berbeda, terutama permasalahan kontribusi pembayaran.⁵⁰

3.1.2. Platform Partai Republik dalam bidang Pertanian, Energi, dan Lingkungan⁵¹

Platform Partai Demokrat menjelaskan bahwa meningkatkan produksi dan ekspor pertanian merupakan salah satu agenda utama Demokrat. Di bawah presiden Republik, negosiator perdagangan Amerika akan menuntut mitra dagang global AS untuk memenuhi standar berbasis sains untuk makanan dan kesehatan yang tentu saja sesuai dengan kebijakan dalam negeri Amerika. Mereka menyatakan penentangan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu yang dinilai akan menghambat produksi pertanian dan perdagangan kebutuhan pangan lainnya sebagai sumber kehidupan ekonomi Amerika. Republik juga mengkritik regulasi Demokrat dan EPA dalam hal pengawasan pertanian dan peraturan lainnya seperti *The EPA's Waters of the United States (WOTUS)* yang dikeluarkan bersama *Army Corps of Engineers* dinilai seperti lelucon. Demokrat dianggap ingin menguasai sector-sektor mikro di bawah peraturan federal.

⁵⁰ Op. cit.

⁵¹ The Committee on Arrangements for the 2016 Republican National Convention, "*Republican Platform 2016*", Republican National Convention (2016), hlm 17-22

Republik juga mengkritik bahwa di bawah kepemimpinan Demokrat, pemberlakuan UU Pertanian sehingga menimbulkan ketidakstabilan kebijakan pertanian. Berkat penurunan dominasi demokrat di kongres, agenda Republik dapat berjalan dengan baik melalui penerapan RUU Pertanian terakhir. Republik juga mengkritik perluasan *Supplemental Nutrition Assistance Program* (SNAP) yang sekarang 70% terdiri dari tagihan pengeluaran sehingga Republik menuntut pemisahan administrasi SNAP dari Departemen Pertanian AS serta berupaya untuk mengembalikan program *Food Stamp* yang telah dihapus pada tahun 1996. Republik juga berupaya untuk melindungi privasi swasta terutama hak kepemilikan pribadi petani dan peternak tanpa intervensi dari pemerintah federal dan menawarkan pengelolaan hutan secara aktif dan berkelanjutan dari 200 hektar tanah yang dikendalikan di bawah Dinas Kehutanan AS untuk mencegah peningkatan kerusakan dan kebakaran hutan.⁵²

Dengan jumlah sumber energy AS yang besar, Republik mendukung UU atau peraturan terkait pengelolaan sumber daya energy, modernisasi pipa dan jaringan listrik, peningkatan ekspor energy, dan pengurangan biaya energy untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan cadangan minyak yang besar di masa depan, diperkirakan mencapai 645 miliar barel. Kebijakan energy Partai Demokrat terlihat dari slogan yang diangkat, yakni, “*keep it in the ground.*” Republik menilai bahwa *Clean Power Plan* sama saja menunjukkan perang presiden terhadap batu bara. Republik berkomitmen untuk menghapus kebijakan tersebut dikarenakan batu bara dinilai sebagai sumber energi lokal yang sangat penting, melimpah, bersih, terjangkau, dan dapat diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian AS.⁵³

⁵² Ibid., hlm 19

⁵³ Loc.cit,

Republik secara tegas menepis anggapan bahwa perubahan iklim merupakan masalah keamanan nasional yang mendesak. Wacana mengenai isu tersebut dianggap hanya merupakan pemikiran dari ekstrimis lingkungan dan Kongres dianggap perlu untuk menghentikan hal ini. Republik mendorong pengembangan sumber energy terbarukan yang hemat seperti panas bumi, biofuel, matahari, angin dengan modal swasta dan pengembangan segala bentuk energy yang bisa dipasarkan di ekonomi bebas tanpa subsidi, seperti batu bara, gas alam, minyak, tenaga air, dan tenaga nuklir. Mereka mendukung perizinan produksi mineral di lahan publik dikarenakan mineral merupakan energy bersih dan teknologi canggih serta mendukung pengembangan energy nuklir yang dapat dilakukan secara benar termasuk dalam proses pengembangan energy nuklir thorium sebagai alternative.

Republik mempercayai bahwa energy merupakan keamanan ekonomi yang sangat penting. Maka dari itu, menentang pajak karbon dalam bentuk apapun dan lebih berfokus pada ekspor energy sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar, meningkatkan keamanan energi mitra dagang, serta membuka peluang kerja yang lebih banyak. Mereka juga menegaskan bahwa ekspansi perdagangan energy di pasar harus dilakukan secara agresif dalam setiap peluang atau kesempatan yang ada. Republik juga mengusulkan pengalihan wewenang dalam regulasi lingkungan dari pemerintah federal ke negara-negara bagian sehingga EPA menjadi badan yang independen dengan perlindungan structural sehingga terbebas dari sains yang dipolitisasi.

Republik mendukung *Antiquities Act* tahun 1906 tentang penetapan hak Kongres AS dalam persetujuan monument nasional dan persetujuan negara di mana monumen atau taman nasional tersebut diajukan. *Endangered Species Act* (ESA) perlu melakukan perlindungan berbagai spesies yang terancam punah dengan cara yang efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam. Maka dari itu, ESA harus menentukan spesies

hewan hampir punah yang benar-benar diperlukan saja berdasar pada pengetahuan ilmiah sehingga tidak menimbulkan masalah akibat kebijakan yang tidak konsisten seperti dalam beberapa decade terakhir.

Dalam platform Partai Demokrat disebutkan bahwa UNFCCC bukanlah sebuah lembaga netral dengan tujuan global, namun tidak lebih dari suatu mekanisme politik global dan lebih kepada suatu komitmen atas kepentingan tertentu dari negara pihak yang menyetujui kesepakatan tersebut. Mereka dinilai tidak mentolerir ilmuwan atau pendapat pihak lain yang tidak sesuai dengan mereka. Jelas ditegaskan bahwa Platform Partai Republik menolak agenda iklim *Kyoto Protocol* maupun *Paris Agreement* dan menuntut AS untuk menghentikan pendanaan dalam kesepakatan tersebut termasuk untuk UNFCCC secara lebih luas berdasarkan *Foreign Relations Authorization Act* tahun 1994 tentang larangan Washington untuk memberikan dana kepada “*any affiliated organization of the United Nations*” yang menyetujui Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Republik menentang keras tindakan Presiden AS untuk memberikan sumbangan atau pendanaan pada agenda UNFCCC, termasuk dalam agenda-agenda *Green Climate Fund* lainnya karena dinilai akan menghambat pertumbuhan ekonomi AS dan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan.⁵⁴ Republik mempercayai bahwa masalah lingkungan lebih disebabkan oleh kegiatan manusia, maka cara terbaik untuk menanganinya adalah melalui pengembangan teknologi baru yang lebih canggih, bukan melalui regulasi atau kontrol pemerintah dengan menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk mengatasi pemasalahan lingkungan dan iklim.

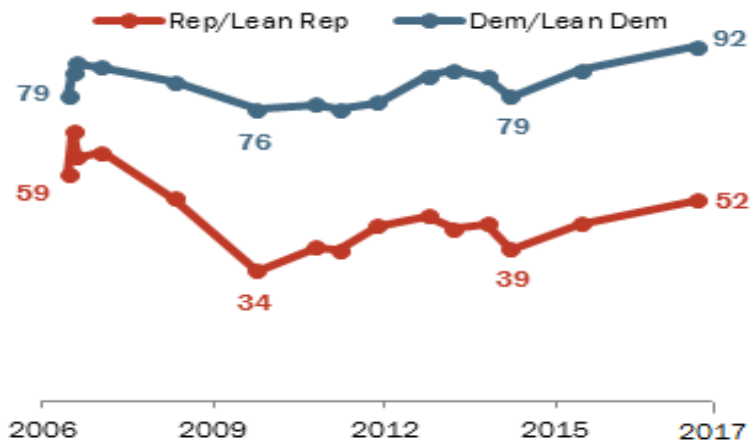
3.1.3. Skeptisme *Republican* terhadap Isu Perubahan Iklim

Dapat disimpulkan dari platform yang diusung oleh Partai Republik yang menyatakan bahwa kalangan Republik meyakini bahwa perubahan iklim bukanlah isu *urgent* yang

⁵⁴ Loc. cit.

perlu diutamakan. Lebih banyak isu-isu lain yang menurut platform Republik lebih krusial, misalnya permasalahan energy. Besarnya pembiayaan untuk mendukung kebijakan-kebijakan iklim dinilai tidak sepadan dan lebih bijak apabila keuangan tersebut lebih difokuskan pada pengembangan teknologi yang dapat mendorong produksi dan ekspor energy Amerika di dunia daripada menghabiskan keuangan untuk menekan penggunaan gas rumah kaca dan produksi batu bara

% who say there is solid evidence that the average temperature on Earth has been getting warmer



Source: Survey conducted June 8-18, 2017. QA77.

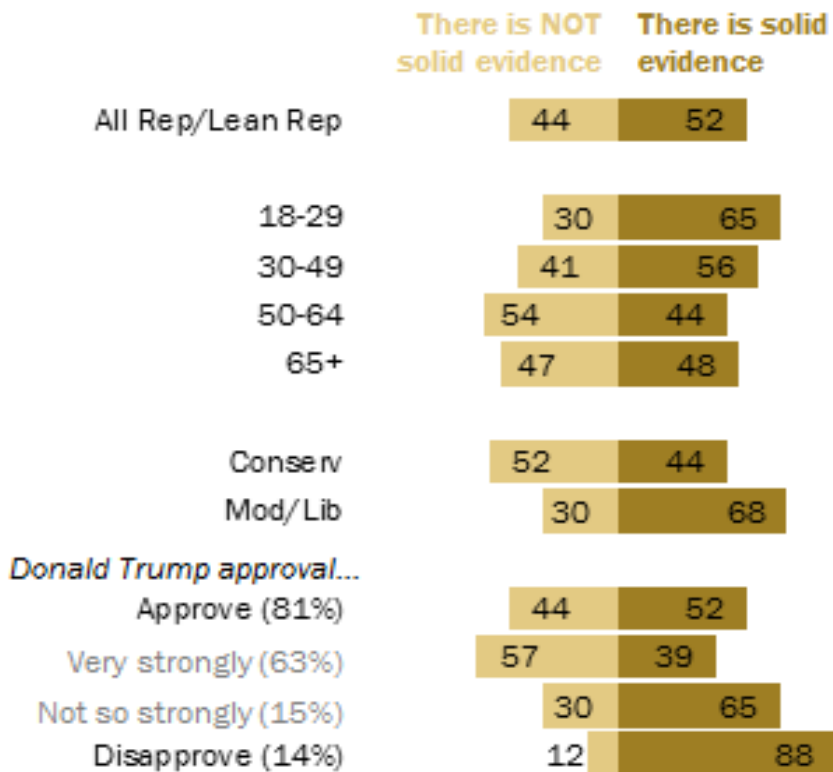
PEW RESEARCH CENTER

Sumber: *Pew Research Center*

Diukur dari hasil survey yang dikeluarkan oleh Pew Research Center, dapat diperhatikan adanya kesenjangan atau *gap* yang besar dari Partai Republik dan Partai Demokrat dalam merespon isu perubahan iklim dan atau global warming. Dari data yang terhidung sejak tahun 2006, skeptisme Republik terhadap isu perubahan iklim cenderung semakin meningkat. Sedangkan, dari kalangan Demokrat

memiliki hasil yang lebih stabil, bahkan sejak 2015 terus menurun.

Grafik 3.2. Skeptisme Republik terhadap Isu Perubahan Iklim



Note: Don't know responses not shown. QA77.

Source: Survey conducted June 8-18, 2017.

Sumber: *Pew Research Center*

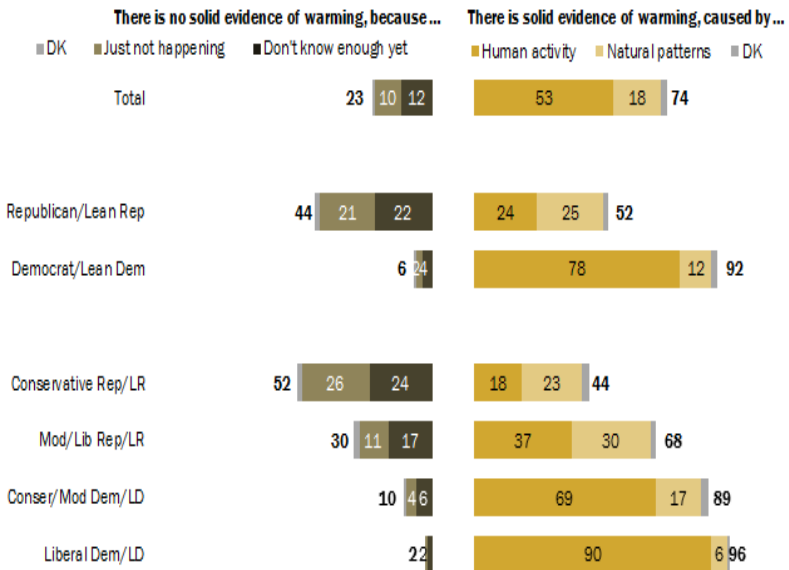
Kepercayaan Partai Republik terhadap adanya bukti kuat mengenai pemanasan global semakin meningkat. Meskipun demikian, perbedaan Partai Republik dan Partai Demokrat sangat jelas, di mana hanya 52% Partai Republik dan independen Partai Republik yang mengakui bahwa

pemanasan global lebih disebabkan akibat aktivitas manusia mengakui kenaikan suhu bumi, sedangkan dari Partai Demokrat mencapai 92%, terhitung sejak tahun 2006. Sebanyak 78% Demokrat mengakui adanya bukti kuat mengenai kenaikan suhu bumi dan sebagian besar terjadi akibat aktivitas manusia meliputi 90% demokrat liberal dan 69% demokrat konservatif dan moderat.⁵⁵

Grafik 3.3. Tingkat Kepercayaan Partai Republik dan Partai Demokrat terhadap Global Warming

Democrats three times more likely than Republicans to say there is solid evidence of global warming and that it is caused mostly by human activity

% who say ...



Note: Figures may not add to 100% because of rounding. QA77/QA77a/QA77b.
Source: Survey conducted June 8-18, 2017.

PEW RESEARCH CENTER

Environmental Regulation, Personal Environmentalism”, diakses dari <http://www.people-press.org/2017/10/05/7-global-warming-and-environmental-regulation-personal-environmentalism/> pada tanggal 29 November 2018 pukul 10.09 WIB.

Sumber: *Pew Research Center*

Persentase kalangan republik yang mengakui bukti-bukti yang menunjukkan adanya pemanasan global cukup jauh dari Demokrat. Hanya 18% dari kalangan Republik Konservatif dan 37% dari kalangan Republikan moderat dan liberal. Terkait dengan efektivitas hukum dan kebijakan-kebijakan lingkungan, 59% masyarakat meyakini bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kebijakan tersebut disebut sepadan. Hanya 37% publik yang meyakini bahwa aturan dan kebijakan-kebijakan lingkungan yang ketat justru melemahkan perekonomian dan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan. Meskipun satu dekade sebelumnya setengah dari kalangan republik meyakini hal yang sama, namun saat ini, kesesuaian dana dengan ketatnya peraturan lingkungan hanya diyakini oleh 36% dari kalangan Republik. Sementara yang mengatakan bahwa ketatnya peraturan tersebut hanya akan melemahkan perekonomian mencapai 58%. Berbeda dengan perspektif dari Demokrat selama dua dekade terakhir yang meyakini bahwa ketatnya peraturan lingkungan sudah dianggap sesuai dan tepat dengan persentasi 77% sejak 2007.

3.2. Pengaruh Platform Partai Republik terhadap Perilaku Politik Presiden Donald Trump

Sejak tahun 2004, Partai Republik telah menjadi lebih konservatif dan lebih homogen dalam isu pemanasan global. Penerapan kebijakan pemerintah iklim yang lemah dan tidak serius juga dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran terhadap respon publik di mana kesadaran publik merupakan sesuatu yang cukup sulit. Isu perubahan iklim selama ini menjadi isu yang cukup kontroversial di Amerika Serikat. Pemanasan global yang terjadi akibat emisi gas karbon atau rumah kaca ini ditimbulkan dari berbagai penggunaan bahan bakar fosil yang digunakan dalam berbagai jenis aktivitas perindustrian modern. Tidak hanya itu, pemanasan global

dapat terjadi dikarenakan adanya gangguan siklus karbon dan penggunaan lahan yang salah.

Amerika Serikat memiliki perbedaan pandangan yang sangat jelas antara kalangan konservatif dan kalangan liberal dalam isu lingkungan dan perubahan iklim, terutama terkait pengurangan gas emisi rumah kaca, di mana dua pandangan tersebut diperjelas dengan dominasi dua kelompok atau partai utama AS yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Selama ini, platform Partai Republik memang lebih memperhatikan permasalahan produksi dan ekspor energy untuk mencapai keuntungan ekonomi dan menjaga dominasi AS di dunia dibandingkan dengan permasalahan iklim yang dinilai bukan sebagai isu *urgent* seperti yang kebanyakan diyakini kalangan Partai Demokrat. Oleh karena itu, adanya *gap* antara platform kedua partai tersebut mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim sangat mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan iklim di AS.

Partai Republik atau disebut juga GOP (*Grand Old Party*) merupakan satu dari dua partai utama AS di mana para pendukungnya berasal dari kalangan konservatif yang memelihara dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Kalangan konservatif merupakan kalangan yang agamis dan sangat memperhatikan kepentingan keluarga yang sebagian besar pendukungnya berasal dari kalangan professional dan pengusaha. Sangat berbeda dengan kalangan Partai Demokrat yang lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dan kesepakatan-kesepakatan baru yang ada dan sebagian besar kalangan pendukungnya justru berasal dari kelompok-kelompok minoritas karena mereka sangat memperjuangkan hak-hak kebebasan dan Hak Asasi Manusia lainnya.

Perbedaan mencolok antara Partai Republik dan Partai Demokrat juga sangat terlihat terhadap sikap kedua partai dalam agenda iklim global, Paris Agreement 2015. Melihat pola kebijakan Obama dari Partai Demokrat yang mendukung aksi iklim dan berusaha menciptakan kebijakan-kebijakan iklim secara lebih konkret, sedangkan pola kebijakan Donald Trump dari Partai Republik terlihat dari kebijakan-kebijakan

Trump yang berusaha untuk menghapuskan beberapa kebijakan iklim yang dibentuk pada masa pemerintahan Obama, lebih jelas perbedaan sikap Obama dan Trump serta kedua partai dalam *Paris Agreement* 2015. Platform dari partai berkuasa termasuk asal partai presiden terpilih menjadi salah satu indikator utama yang akan sangat mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan presiden terpilih pada masa pemerintahannya. Melalui platform partai yang diusung oleh Partai Republik dari masa ke masa dapat difahami arah kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump, utamanya dalam platform Partai Republik dalam bidang lingkungan dan iklim.

Pada saat masa kampanye, Presiden Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan skeptismenya terhadap perubahan iklim yang menggambarkan pola kebijakannya dalam isu lingkungan dan perubahan iklim apabila ia terpilih menjadi presiden AS. Ia memiliki orientasi tinggi terhadap keuntungan ekonomi dari pengembangan teknologi dalam rangka memperbesar dominasi AS sebagai eksportir energy utama di dunia. Misalnya terlihat dari rencananya untuk mengembalikan jaringan pipa *keystone XL* yang telah dibatalkan pada masa pemerintahan Barack Obama dan menarik AS dari *Paris Agreement* yang dianggap hanya melemahkan industry-industri AS, terutama industry batu bara, minyak, dan gas alam dikarenakan kesepakatan tersebut ia percayai sebagai jalan negara-negara lain untuk mendapatkan keuntungan dari AS.⁵⁶

Kebijakan iklim Presiden Donald Trump juga dapat diamati dari perilaku atau sikap para pendahulunya yang berasal dari Partai Republik dalam isu perubahan iklim yang juga sesuai dengan platform Partai Republik. Pada tahun 1960, pemerintah federal mulai melakukan langkah-langkah yang

⁵⁶ Steve Baragona, “*Kebijakan Lingkungan dan Energi Berubah di Bawah Pemerintahan Trump*“, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kebijakan-lingkungan-dan-energi-berubah-di-bawah-trump-/4173570.html> 1/2 22/12/2017 pada 21 Februari 2019 pukul 13.08 WIB

lebih pasti dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Misalnya, pembentukan *Clean Air Act* dan *Clean Water Act* dalam rangka membuat ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan standar lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam aktivitas bisnis dan lain-lain. Selain itu, dibentuk pula NEPA (*National Environmental Policy Act*) disahkan pada tahun 1969 yang kemudian diikuti dengan pembentukan EPA (*Environmental Protection Agency*) pada masa pemerintahan Ricard Nixon tahun 1970 sebagai badan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan lingkungan (termasuk iklim) yang telah disahkan. Ricard Nixon sebelumnya tidak benar-benar mempunyai minat khusus dalam permasalahan lingkungan terutama iklim, namun melihat respon dan harapan dari masyarakat untuk memberikan perhatian lebih pada permasalahan lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka Nixon kemudian mulai mengambil langkah penting dalam permasalahan tersebut dengan di bentuknya EPA dan disahkannya UU lingkungan NEPA, *Endangered Species Act*, *Clean Water Act*, dan *Clean Air Act* yang dewasa ini ini telah berubah menjadi masalah bagi Partai Republik kontemporer.

Pada pemilihan presiden Trump, pandangan berbeda kedua kandidat telah menimbulkan kontroversi dan konflik perbedaan-perbedaan yang sangat jelas antara kandidat Demokrat dengan kandidat Republik, terutama persoalan tentang perubahan iklim. Keputusan Trump untuk menarik AS dari Paris Agreement ini juga dilihat dari sudut pandang masyarakat pendukungnya, di mana ia pun tidak menyimpang dari agenda politik pendahulunya dari Partai Republik sejak masa pemerintahan Ronald Reagan, di mana telah diketahui sejak awal sikap pemerintah Reagan yang memang tidak begitu suka terlibat dengan PBB untuk permasalahan investasi dalam penelitian.

George H W Bush lebih mirip dengan Ricard Nixon di mana keduanya menjadi presiden yang cukup memperhatikan masalah lingkungan dikarenakan aspirasi dan dorongan

masyarakat. Misalnya, saat Bush mensponsori amandemen *Clean Air Act* 1970 sebagai salah satu pencapaian terbesar pada era Bush. Namun, meskipun Bush menyepakati beberapa agenda iklim termasuk dalam UNFCCC, namun ia hanya menunjukkan peran yang lemah didalamnya. Terutama ia mengatakan bahwa tidak akan terlibat dalam aksi iklim yang berkenaan dengan upaya atau tindakan dalam menstabilkan dan mereduksi gas rumah kaca dalam bentuk apapun.

Memasuki era Bill Clinton, presiden asal Demokrat bersama Albert Gore sebagai wakilnya yang juga dikenal sebagai tokoh yang gencar mengkampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim bahkan sampai mendapat nobel dari *Intergovernmental Panel on Climate Change*. Kemudian ia mulai mengambil langkah penting untuk menunjukkan keseriusan AS untuk berpartisipasi dalam agenda iklim global melalui ditandatanganinya *Kyoto Protokol* 1997 pada saat COP ke-4 tahun 1998. Pada tahun 1997, Partai Demokrat mengambil kursi dengan Demokrat di Senat untuk menghalangi ratifikasi *Kyoto Protokol* 1997 yang telah ditandatangani oleh Bill Clinton. Meskipun telah melewati perundingan yang cukup panjang, langkah tersebut akhirnya terhenti karena tidak mendapat dukungan dari senat AS yang digawangi oleh Partai Republik.

Menurut Senat, *Kyoto Protokol* 1997 merupakan kesepakatan yang hanya akan membawa kemunduran bagi perkembangan perekonomian AS. Pada era Clinton memang banyak pejabat asal Republik beserta kalangan pendukungnya mengambil langkah-langkah yang lebih agresif di bawah pengaruh Newt Gingrich dari Partai Republik yang memegang kekuasaan di *House of Representatives* AS pada masanya didukung oleh para kontraktor dan kalangan para pengusaha melihat bahwa kebijakan lingkungan atau aksi-aksi iklim tersebut merupakan sebuah strategi yang dapat digunakan untuk mengacaukan sistem dan prinsip-prinsip pasar bebas.

Pada masa pemerintahan George W Bush asal Republik, langkah-langkah atau upaya yang telah dilakukan Clinton dalam mendukung aksi iklim benar-benar dihapuskan,

misalnya penarikan AS dari Kyoto Protocol 1997 pada tanggal 29 Maret 2001 meskipun kesepakatan tersebut baru terbatas pada penandatanganan tanpa diratifikasi. Partai Republik lebih diuntungkan lagi begitu memasuki era Bush. Misalnya, pada saat EPA mengajukan permasalahan iklim ke Mahkamah Agung AS yang akhirnya Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa di bawah ketentuan *Clean Air Act*, administrasi Bush harus mengurangi gas emisi karbon karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan secara lebih luas. Sikap Bush dalam menanggapi putusan tersebut adalah dengan bersikap menunda-menunda. Pada tahun 2007, Bush menandatangani *Energy Independence and Security Act* dalam rangka meningkatkan standar *Corporate Average Fuel Economy* untuk sector transportasi.

Permasalahan Republik dalam isu perubahan iklim semakin berkembang pada masa pemerintahan Barack Obama yang dikenal vocal dalam mengkampanyekan dampak perubahan iklim didukung dengan aksi-aksi dan kebijakan yang konkret dan eksplisit. Terlebih lagi setelah munculnya gerakan gerakan Tea Party yang menjadi penyebab gagalnya pengesahan UU *cap-and-trade* dalam skema perdagangan karbon. Namun, perbedaan pendapat diantara Partai Republik dan gerakan konservatif memang ada dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Misalnya, 3 bulan sebelum Trump mengumumkan penarikan diri AS dari *Paris Agreement*, *Climate Leadership Council* yang dibawa oleh Henry Paulson dan James Baker, keduanya merupakan dua tokoh besar kalangan konservatif yang mengajukan permintaan persetujuan pajak karbon kepada Partai Republik yang memegang dominasi di Kongres AS dengan alasan bahwa pajak tersebut dapat menurunkan emisi gas karbon tanpa mempengaruhi prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas. Meskipun demikian, hal tersebut tidak cukup memberi pengaruh terhadap para petinggi Partai Republik lainnya.

Donald Trump dan sebagian besar kalangan Republik melihat dari kenyataan yang dirasakan langsung seperti peristiwa-peristiwa badai es dan semakin dinginnya suhu pada

musim dingin di AS tidak seperti apa yang selama ini digembar-gemborkan kelompok pro-perubahan iklim. Kalaupun di negara lain dampak berbeda dapat dirasakan, namun di AS masih berbeda dari wacana perubahan iklim yang selama ini dipercaya masyarakat sedangkan AS dituntut untuk mengeluarkan triliunan dollar untuk sesuatu yang tidak menguntungkan AS namun malah memberikan peluang bagi negara-negara lain untuk menyaingi keunggulan kompetitif AS.

Kebijakan Trump tercermin dan tidak jauh-jauh dari sikap para pendahulunya dari Partai Republik sejak masa Ronald Reagan, meskipun sedikit berbeda dengan George H W Bush yang pada awal pemerintahannya ia turut berperan mendukung sejumlah aksi iklim meskipun masih terbilang lemah. Seperti sudut pandang Trump, republican secara umum lebih menyukai sistem pasar bebas yang apa adanya dibandingkan dengan kerjasama berupa kesepakatan atau kebijakan-kebijakan internasional yang mengharuskan AS memberikan kontribusi sejumlah dana untuk kepentingan internasional yang di mana hal itu malah memberikan keuntungan untuk negara-negara pesaing AS. Pemikiran ini berkembang sejak masa Reagan. Sebelumnya, AS aktif berkontribusi dalam UNEP (*UN Environmental Program*) dan kesepakatan-kesepakatan yang berkenaan dengan lingkungan dan aksi iklim global. Ronald Reagan juga tidak ingin menandatangani *Montreal Protocol* 1989 yang merupakan salah satu agenda iklim yang juga berada di bawah UNFCCC. George H W Bush juga enggan menandatangani *Convention on Biological Diversity* dengan alasan dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kebebasan hak-hak property milik perusahaan-perusahaan AS sehingga mengakibatkan melemahkan daya saing industri dan ekonomi AS.

Progresifnya kebijakan-kebijakan iklim pada masa pemerintahan Obama membuat para ahli konservatif dan libertarian semakin mengkhawatirkan permasalahan biaya karbon yang tentu saja akan berdampak pada biaya energy yang lebih tinggi bagi keluarga maupun pebisnis. Kemudian,

pada gilirannya, Trump menerapkan system *cap-and-trade* untuk menurunkan emisi karbon namun dengan biaya karbon yang disepakati oleh pemerintah federal AS, bukannya justru pihak lain, seperti *Heritage Foundation* karena bisa saja hal tersebut merupakan instrument bagi mereka untuk mengontrol pasar mikro energy AS.

Dibandingkan dengan upaya-upaya mengatasi dampak perubahan iklim di masa depan, didalam platform Partai Republik jelas dikatakan bahwa mereka lebih mengutamakan bagaimana menciptakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor energy AS sehingga dapat meningkatkan dominasi AS di pasar energy dunia. Termasuk didalamnya meningkatkan produksi batu bara, minyak, dan gas alam yang dikelola di tanah publik dan hal itu juga sejalan dengan kebijakan Partai Republik sejak era Reagan hingga sekarang ini.

Hal tersebut dapat terlihat bagaimana platform Partai Republik memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengendalikan arah kebijakan presiden-presiden AS asal Republik. Misalnya, di bawah kepemimpinan Reagan tercatat bahwa jumlah izin pengemboran gas dan minyak di lahan publik meningkat hingga 30% dibandingkan era Carter. Sedangkan pada masa George W Bush , jumlah perizinan pengeboran minyak dan gas naik hingga 3 kali lipat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan Bush lebih berfokus pada pengembangan minyak dan gas daripada keanekaragaman hayati. Pola yang sama juga dapat diamati dari kebijakan di dua tahun terakhir George H W Bush di mana ia juga memprioritaskan kebijakannya pada sector energy dan menolak untuk terlibat dalam upaya menghadapi perubahan iklim melalui reduksi dan stabilisasi emisi gas karbon atau gas rumah kaca.⁵⁷

⁵⁷ Jean-Daniel Collomb, “A Worthy Heir: Donald Trump, the Republican Party and Climate Change”, *Lisa e-Journal*, Vol. XVI , hlm. 3-8

Dapat diamati dari rekam jejak para pendahulunya yang berasal dari Partai Republik yang didasarkan pada ortodoksi platform Partai Republik, maka perilaku politik Presiden Donald Trump juga diprediksi akan memiliki pola kebijakan yang serupa dalam menjalankan pemerintahannya, dalam arti tidak melenceng dari agenda yang telah ditetapkan dalam platform dan kebijakan presiden Republik sebelumnya, termasuk lebih jelas dalam isu perubahan iklim. Tidak lama setelah ia terpilih menjadi presiden AS yang ke-45, Trump membuat kebijakan *Energy Independence Executive Order* yang dibentuk untuk menghentikan sejumlah kebijakan lingkungan dan perubahan iklim Obama. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pengusaha atau pebisnis, namun tentu saja mendapat kritik dan pertentangan dari para ilmuwan dan peneliti serta kalangan pro-lingkungan lainnya. Tidak sampai disitu, administrasi Trump juga memangkas sepertiga dana EPA sehingga peran EPA menjadi semakin lemah.⁵⁸ Visi yang diusung Trump menyesuaikan dengan ortodoksi Republik yang didasarkan pada platform Partai Republik.

Pada pidato tanggal 29 Juni 2017, ia menegaskan niatnya untuk mendorong produksi dan ekspor energy dan bahan bakar fosil serta menghidupkan industri batu bara sehingga AS dapat mandiri dan terbebas dari ketergantungan dengan negara lain dan ketidakstabilan pasar global. Sebagian besar pendukung Partai Republik yang berasal dari kalangan pengusaha tentu banyak memberi dukungan terhadap upaya tersebut di mana jika Trump tetap mempertahankan AS dalam *Paris Agreement* dengan bentuk kesepakatan yang justru bertentangan atau tidak sesuai dengan misi pengembangan sektor energi seperti batu bara, tentu hal tersebut bisa saja menjadi penghalang upaya tersebut sehingga kalangan

⁵⁸ Arie Mega Prastiwi, “*Trump Hapus Kebijakan Lingkungan Obama, AS Kembali ke Era Tambang*”, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/2902508/trump-hapus-kebijakan-lingkungan-obama-as-kembali-ke-era-tambang> pada 13 Oktober 2018 pukul 14.11 WIB.

Republik mengartikannya sebagai sebuah hambatan atau ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi AS.

Sudut pandang Trump sebagai seorang pebisnis atau pengusaha sukses, dibandingkan dengan menggelontorkan sejumlah dana untuk kebijakan-kebijakan iklim yang dinilai bukan ancaman darurat bagi AS seperti yang diyakini kebanyakan kalangan Demokrat, administrasi Trump berbasis platform yang diangkat oleh Partai Republik lebih mengutamakan pengembangan produksi dan ekspor energy yang dapat memperluas dominasi dan ekspansi ekonomi AS di kancah global. Pola kebijakan Trump tidak akan jauh-jauh dari para pendahulunya yang berasal dari Partai Republik. Hal ini terbukti melalui upaya menghapus sejumlah kebijakan iklim Obama dan membatasi akses ketersediaan data iklim oleh pemerintah federal AS. Administrasi Trump juga memotong anggaran alokasi *National Oceanic, Atmospheric Administration*, dan *National Environmental Satellite, Data, and Information Service*, serta dua entitas besar yang melaporkan data iklim bagi pemerintah AS dan negara-negara lainnya di mana keduanya sangat penting. Bahkan, informasi berupa data-data ilmiah mengenai perubahan iklim yang telah dipublikasikan dan tertera di situs web sejumlah lembaga federal AS juga sampai dihapus. Namun, strategi Trump untuk menghilangkan data-data ilmiah mengenai perubahan iklim tidak sepenuhnya efektif dikarenakan setelah upaya-upaya tersebut, *US Global Change Research Program* merilis laporan mengenai consensus ilmiah mengenai perubahan iklim akibat aktivitas manusia.⁵⁹

⁵⁹ Jean-Daniel Collomb, "A Worthy Heir: Donald Trump, the Republican Party and Climate Change", *Lisa e-Journal*, Vol. XVI, hlm. 3-8